

ABSTRAK

Penerapan Dakwaan Alternatif Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Pemidanaan pelaku penipuan online didasarkan pada sistem peradilan pidana yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dimana pada kenyataannya pemidanaan tersebut merupakan penerapan sanksi pidana yang tidak terlepas dari keadilan yang dinilai majelis hakim dalam kasus penipuan online. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian ini antara lain: 1. Bagaimana penerapan dakwaan alternatif dan penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)? 2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam putusan kasus putusan Pengadilan Negeri Makasar dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online yang merugikan masyarakat?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada penggunaan teori peradilan pidana, teori kejahatan dunia maya, teori penegakan hukum, dan teori keadilan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan perundang-undangan, teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1. Penerapan dakwaan alternatif dan penyertaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 2. Berdasarkan pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua karena menganggap terdakwa yang memaksa orang lain untuk melakukannya atau penyuruh (Doenpleger).

Kata kunci: Tindak Pidana, Penipuan Online, UU ITE, KUHP, KUHP

Abstract

Implementation of Alternative Charges Against Actors Participating in Online Fraud Crimes (Case Study of Makassar District Court Decision Number 518/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

The punishment of online fraud perpetrators is based on the criminal justice system that applies in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), where in reality the punishment is the application of criminal sanctions that cannot be separated from justice judged by the panel of judges in online fraud cases. . Therefore, the problems in this study include: 1. How is the application of alternative and inclusion charges according to the Criminal Code (KUHP)? 2. What is the judge's consideration in the decision on the decision Makassar District Court in the context of law enforcement against online fraud perpetrators who harm the community? The theory used in this study is based on the use of criminal justice theory, cyber crime theory, law enforcement theory, and justice theory. While the research method used is normative legal research, with data collection techniques in the form of literature and legislation studies, qualitative data analysis techniques. The results of the study conclude that: 1. The application of alternative charges and inclusion according to the Criminal Code (KUHP) has complied with the applicable laws and regulations. 2. Based on the consideration of the Makassar District Court Judge's Decision, the panel of judges chose the second alternative indictment because they considered the defendant to be the one who forced other people to do it or the agent (Doenpleger).

Keyword : criminal act, online fraud, ITE Law, KUHP, KUHAP